

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT
DALAM UPAYA KEWASPADAAN DINI MENGENAI COVID-
19 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S.H. dalam
Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**A. RIANSYAH PRATAMA
NPM : 1721020001**

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT
DALAM UPAYA KEWASPADAAN DINI MENGENAI COVID-
19 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S.H. dalam Ilmu
Syari'ah**

Oleh:

**A. RIANSYAH PRATAMA
NPM : 1721020001**

Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iiyyah)

**Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.
Pembimbing II : Muhammad Jayus, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

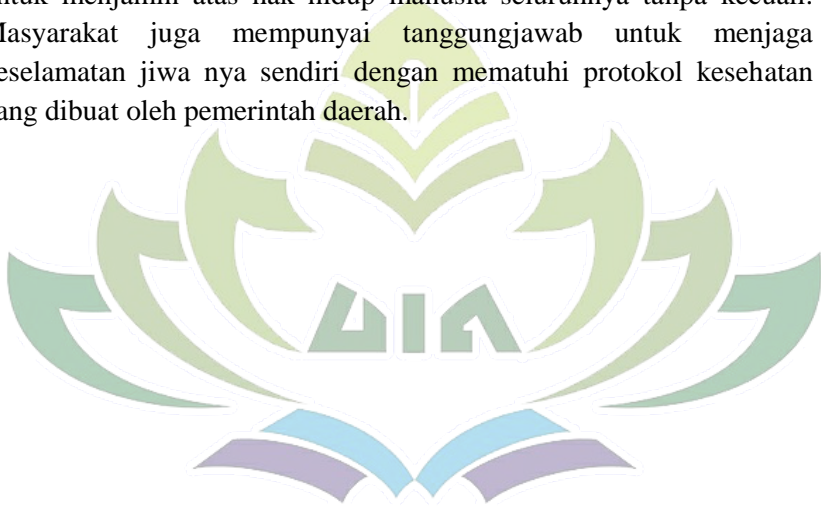
ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dapat di wujudkan melalui perlindungan hukum dan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberian fasilitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat saat ini masih menghadapi problematika kesehatan, masalah kesehatan yang masih mengkhawatirkan yang ada di Indonesia bahkan Negara-negara lain di dunia adalah fakta berkembangnya *epidemic* yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) atau Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dalam hal ini perlu adanya peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menanggulangi penyebaran virus corona.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 1) Bagaimana peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini mengenai COVID-19 di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan 2) Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap peran peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini mengenai COVID-19 di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, mengadakan wawancara dengan informan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai masalah yang diteliti dengan mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen tertulis, buku-buku, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian ini serta ditunjang oleh data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi, monografi kecamatan. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan upaya yang pemerintah daerah kecamatan dan masyarakat lakukan dalam mewaspadai COVID-19.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini mengenai COVID-19 di kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan telah maksimal yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari

kerumunan sehingga seluruh masyarakat telah menerapkan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah namun terdapat hambatan yang dihadapi hambatan tersebut diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya anggaran COVID-19. Menurut perspektif Fiqh Siyasah Pemerintah Daerah kecamatan adalah sebagai pemimpin dan pembuat kebijakan termasuk protokol kesehatan dalam upaya mewaspadai COVID-19 tersebut bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah kecamatan kepada masyarakat yaitu pencegahan dan penanganan terhadap virus corona merupakan menjaga keselamatan jiwa yang erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa kecuali. Masyarakat juga mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keselamatan jiwa nya sendiri dengan mematuhi protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah daerah.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. H. Endro Suratmin, Sukaramé, Bandar Lampung, 35313, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

Nama : A. Riansyah Pratama

NPM : 1721020001

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag
NIP. 195607271988031901**

Pembimbing II

**Muhammad Jayus, M.H.I
NIP. 198802092019031007**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah**

**Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. H. Endro Suratmin, Sukaramé, Bandar Lampung, 35313, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah** (Studi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) oleh **A. Riansyah Pratama NPM 1721020001** program studi Siyasah, telah diujikan dalam Sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 08 Juni 2021.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Sekretaris : Rudi Santoso, MHI., M.H

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M. Sos.I.

Penguji II : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag

Penguji III : Muhammad Jayus, M.H.I

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

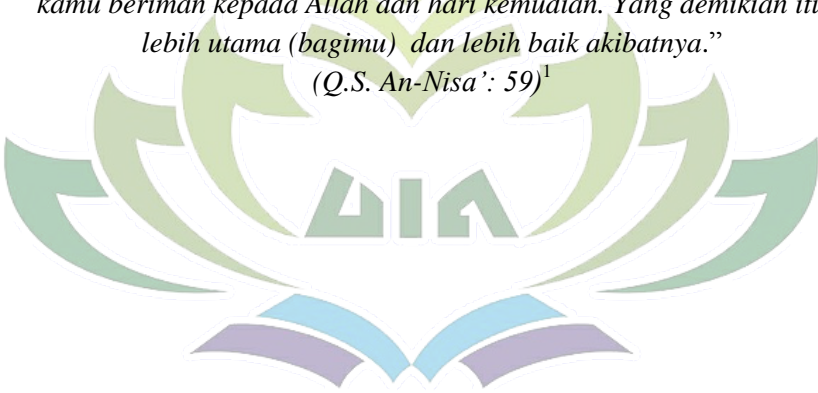
MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(Q.S. An-Nisa': 59)¹



¹ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemahan Hadis*, (Bandung : Cordoba Internasional, 2004), 87.

PERSEMBAHAN

Bismillaahirohmaanirrokhimm...

Teriring doa dan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhanku yang senantiasa memberikan kesempatan untuk berubah lebih baik dan bermanfaat Nabi Muhammad saw, Panutanku yang senantiasa aku harap syafa'atnya dan pengakuan sebagai umatnya kelak di akhirat.

1. Cahaya hidupku Ayahanda Romli dan Ibunda Saryuni tersayang yang selalu memberi motivasi, baik materil maupun spiritual.
2. Adik Tersayang, Rosella Oktiviani Amelia, Tri Rangga dan Intan Maharani yang selalu memberi nasehat, semangat, motivasi yang tiada henti serta selalu memberikan semangat untuk terus maju.
3. Sahabat-sahabatku Syari'ah Median, Resa, Pedri, Muhammad Idha, Hefrian, Doni, Junaidi, Anggi, Maharani, Devi, Raharti, Niken, Abiba Teman-temanku Emi, Dean, Fattur, Adhitia, Dicky, Lesti, Regina, Miri, Nur Lely, Ratna dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun material dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Riansyah Pratama adalah anak pertama dari 4 bersaudara, yang dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 November 1999 dari pasangan Ayahanda Romli dan Ibunda Saryuni jenis kelamin Laki-laki bertempat tinggal di Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,. Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar dimulai dari TK Ra Daya, Bandar Lampung pada tahun 2004 dan menyelesaikannya pada tahun 2005. SDN 01 Candimas, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2005 dan menyelesaikannya pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2011 dan menyelesaikannya pada tahun 2014, kemudian melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Natar pada Tahun 2014 dan menyelesaikannya pada Tahun 2017. Kemudian melanjutkan pada tahun 2017 menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (IAIN) yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) pada Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Tatanegara.

Bandar Lampung, 18 Januari 2021
Yang Membuat

A. Riansyah Pratama

1721020001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, karena atas izin-Nya karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa maha kuasa-Nya Engkau yang telah memberikan segala kemudahan untuk meraih ilmu-Mu yang luas. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang kasih sayang Nya terhadap sesama hamba Allah memancar bagai sinar matahari yang tiada putus menerangi bumi.

Adapun judul skripsi ini **“Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai COVID-19 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”** Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Tatanegara pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan dan Civitas Akademik Syari’ah.

Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas do’a dan dukungannya dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini. Dengan segala kerendahan hati terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung, yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung nilai-nilai Islami.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Islam UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan 1,2 ,3
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Islam UIN RadenIntan Lampung.

4. Bapak Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Jayus, M.H.I., selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seseorang yang masih menjadi rahasia Allah Swt, yang kelak akan mendampingi dalam meraih kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Rabb seluruh alam. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan khususnya dan bagi kita semua pada umumnya Amiin.

Bandar Lampung, 18 Januari 2021

A. Riansyah Pratama
1721020001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya.....	19
1. Pengetian Fiqh Siyasah.....	19
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	20
B. Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Fiqh Siyasah	23
1. Konsep Pemerintahan	23
2. Pengertian Pemerintah Daerah dan Masyarakat	25
3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.....	31
4. Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Masyarakat.....	36
C. Coronavirus (COVID-19)	39

1. Pengertian Coronavirus (COVID-19)	39
2. Gejala-gejala Virus Corona.....	40
3. Penyebaran dan Penularan COVID-19	42
4. Pencegahan Virus Corona	45
5. Istilah-Istilah Baru dalam COVID-19	46
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Natar.....	51
1. Letak Geografis.....	51
2. Keadaan Demografi	51
3. Keadaan Pertanian.....	52
B. Gambaran Umum Kantor Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.	52
1. Profil Kantor Camat Natar	52
2. Sumber Daya Manusia	54
3. Sarana Kesehatan	57
C. Tugas Pokok Pemerintah Daerah Kecamatan	59
D. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	61
1. Upaya Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Kewaspadaan Dini mengenai COVID-19	61
2. Peran Pemerintah Daerah kecamatan dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai COVID-19.....	65
3. Peran masyarakat Kecamatan dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai COVID-19.....	73
4. Faktor Penghambat Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Kewaspadaan Dini mengenai COVID-19	78
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Analisis Data Penelitian	85
B. Temuan Penelitian.....	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Rekomendasi	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Data COVID-19 Lampung Selatan	54
3.1 ASN Kecamatan Natar Berdasarkan Kepegawaian	59
3.2 Daftar Pegawai di Kecamatan Natar	59
3.3 Sarana Kesehatan	61
3.4 Susunan Satgas Kecamatan Natar	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Kecamatan Natar	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah. Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, adapun judul skripsi ini adalah “Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai COVID-19 Perspektif Fiqh Siyasah” (Studi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).

Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul.

1. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.¹
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.²
3. Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.³
4. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan,

¹ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), .

² Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 2.

³ Manandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 122.

hambatan dan gangguan dengan meingkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.⁴

5. COVID-19 adalah Penyakit Menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia virus yang menyerang sistem pernapasan.⁵
6. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.⁶
7. Fiqh Siyasah adalah ilmu tatanegara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam.⁷

Berdasarkan penegasan kalimat diatas maka dapat disimpulkan bahwa dimaksud dengan “Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai COVID-19 Perspektif Fiqh Siyasah” adalah menelaah Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam meningkatkan upaya kewaspadaan dini mengenai COVID-19 di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah.

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 3.

⁵ Anwar Daud,dkk, *Penanganan Coronavirus(Covid-19) Ditinjau Dari Perspektif Kesehatan Masyarakat*, (Yogyakarta: Gosyen Publising, 2020), 6.

⁶ Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Raya Grafindo Persada, 2010), 10.

⁷ Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik*. (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

B. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dapat di wujudkan melalui perlindungan hukum dan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberian fasilitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁸ Karena itu, kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa adanya kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Rendahnya suatu pemahaman seseorang terhadap pentingnya kesehatan bagi dirinya sendiri membuat mereka memandang sebelah mata akan adanya permasalahan kesehatan di lingkungan sekeliling mereka.

Negara Indonesia saat ini masih menghadapi problematika kesehatan yang memberikan dampak sosial yang kompleks dan menjadi kendala pembangunan yang harus segera diselesaikan. Masalah kesehatan yang masih mengkhawatirkan yang ada di Indonesia bahkan Negara-negara lain di dunia adalah fakta berkembangnya *epidemic* yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* atau Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut *Corona-virus Disease-2019 (COVID-19)*. Virus ini di Indonesia sudah menjadi wabah penyakit yang menular dalam seluruh lapisan.

Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kekelawar dan unta.⁹ Penyakit Virus Corona ini menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Bahkan setelah diumumkan kasus pertama tentang salah satu rakyat Indonesia

⁸ Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1 Ayat 1.

⁹ Adityo Susilo, Dkk, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No 1, Maret 2020, 45.

yang terkena COVID-19 masyarakat masih tenang-tenang saja dalam menyikapi. Walaupun masyarakat dianjurkan untuk tetap tenang dan tidak gegabah dalam menghadapi keadaan tersebut tetapi tidak dipungkiri masyarakat harus tetap waspada.

Peningkatan kasus terus bertambah dalam hal ini peran pemerintah daerah dalam mengambil tindakan kewaspadaan dini kepada masyarakat agar tetap tinggal di rumah untuk mengurangi penyebaran virus corona, kesadaran diri masyarakat sangatlah penting dalam keadaan yang seperti sekarang masyarakat juga mempunyai peran dalam mengurangi penyebaran COVID-19 dengan menjaga diri dengan tetap di rumah, memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan anjuran pemerintah daerah yang diperintahkan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19.

Penyebaran COVID-19 merupakan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan terhadap kesehatan setiap lapisan masyarakat dan membahayakan keselamatan, keamanan, kedaulatan masyarakat. Perlu adanya Peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan Kewaspadaan dini mengenai bahaya COVID-19. Kewaspadaan dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.¹⁰

Penyebaran Penyakit COVID-19 di Provinsi Lampung mesti diwaspadai oleh seluruh elemen masyarakat, terutama masyarakat di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan. Oleh karena itu perlu adanya peran Pemerintah Daerah dan masyarakat di kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan dalam meningkatkan

¹⁰ Peraturan Menteri dalam negeri no 46 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 3.

kewaspadaan dini mengenai ancaman COVID-19. Semua pihak harus terlibat untuk meningkatkan sistem kewaspadaan masyarakat.¹¹

Pemerintah daerah dalam Perspektif Fiqh Siyasah sebagai pemimpin adalah amanah untuk melindungi rakyatnya. Pemerintah daerah mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat demi tercapainya perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut. Pemerintah daerah memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari ancaman dan gangguan terutama dalam hal kesehatan.¹²

. Imamah harus menjaga dan melestarikan hukum-hukum, lebih-lebih menyangkut akidah, memerangi musuh yang mengancam keamanan maupun kesehatan Negara dan bangsa dan menjaga keamanan dan keadilan rakyatnya.¹³ Pemerintah Daerah (imamah) sebagai pemimpin merupakan tanggung jawab besar karena itu merupakan amanah dari Allah SWT, baik atau tidaknya sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri. Untuk itu di dalamnya ada dua pihak yang berperan antara lain yang di pimpin (Masyarakat) dan yang memimpin (Pemerintah Daerah). Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik.¹⁴ Pemerintah Daerah sebagai pemimpin merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Allah SWT berfirman QS Al-Mukminun: 8 :

¹¹ Eliterius Sennen, *Kewaspadaan Dini Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Masyarakat*, Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar Vol. 3, No 2, Juli 2019.

¹² Muchamad Mirsa Kurniawan, *Peran Pemerintah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Jurnal Al Daulah Vol. VI No. 2, Oktober 2016.

¹³ Wahyu Abdul Jafar, *Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No 1, 2017.

¹⁴ Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islami*, cet 1, (Yogyakarta: AK Grup, 2006), 52.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya”. (QS Al-Mukminun[23]:8)¹⁵

Imamah di suatu daerah adalah wajib hukumnya, tujuannya adalah menegakan hukum Allah dan mengatur sistem kemasyarakatan yang berlandaskan syariat untuk mencapai kemaslahatan. Imamah harus menjaga dan melestarikan hukum-hukum, lebih-lebih menyangkut akidah, memerangi musuh yang mengancam keamanan maupun kesehatan Negara dan bangsa dan menjaga keamanan dan keadilan rakyatnya.¹⁶

Pemerintah Daerah sebagai pemegang amanat kekuasaan di daerah pemerintah daerah haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan fisik dan mental untuk dapat mengendalikan roda kepemimpinan dan memikul tanggungjawab, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa':83 :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى

الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

“Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemahan Hadis*, (Bandung : Cordoba Internasional, 2004), 342.

¹⁶ Wahyu Abdul Jafar, *Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No 1, 2017.

dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulul Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)”. (QS Surat An-Nisa’[4]: 83)¹⁷

Masyarakat menyerahkan informasi keamanan terhadap permasalahan ini kepada Pemerintah (imamah) dan harus patuh dengan apa yang diserukan pemerintah juga perlu adanya peran penting kerjasama antara masyarakat dan pemerintah terhadap ancaman yang terjadi. Masyarakat juga harus selalu taat atas perintah yang dilakukan oleh pemimpin. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa: 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS Surat An-Nisa’[4]: 59)¹⁸

Keberadaan COVID-19 yang menyerang seluruh lapisan masyarakat saat ini perlu di waspadai oleh pemerintah daerah sebagai pemimpin daerah mempunyai amanah dan tanggung jawab yang besar untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman virus corona tersebut. Perlu adanya

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemahan Hadis*, 91.

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemahan Hadis*, 87.

kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk sama-sama menghindari dan mewaspadai pencemaran virus corona yang sedang mewabah ini.

Berdasarkan gambaran yang telah peneliti paparkan, bagaimana pentingnya kewaspadaan dini mengenai COVID-19 yang sekaligus juga melatarbelakangi penulisan untuk menuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul: **Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai COVID-19 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).**

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus Penelitian merupakan penetapan area spesifik yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini berfokus pada Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini terhadap penularan penyakit COVID-19 dalam perspektif Fiqh Siyasah.

Sub-Fokus Penelitian ini terdiri dari bagaimana peran pemerintah daerah dalam upaya mewaspadai penyebaran COVID-19 dan dari bagaimana peran masyarakat dalam upaya mewaspadai penyebaran COVID-19.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan di ajukan adalah:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini mengenai COVID-19 di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini mengenai COVID-19 di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini mengenai COVID-19 di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini mengenai COVID-19 di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dilihat dari Perspektif Fiqh Siyasah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai peranan pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini mengenai COVID-19 di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan menambah literature mengenai hal tersebut bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah (Hukum Tatanegara).
2. Untuk memperluas pengetahuan penulis dan bagi masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, maupun kegunaan praktis berupa pemecahan permasalahan maupun penyelesaian dalam praktek.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan peneliti melihat ada yang membahas tentang Kewaspadaan Dini seperti pada Skripsi dan Jurnal Ilmiah dibawah ini yaitu:

1. Skripsi Karya Syahrini Sarmin yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Program Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) pengendalian Kasus Diare Akut di Puskesmas Kabupaten Takalar Tahun 2015”. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan program Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon terhadap pengendalian kasus diare akut di Puskesmas Kabupaten Takalar. Saran dari penelitian ini adalah diharapkan kepada pihak puskesmas di seluruh Kabupaten Takalar agar meningkatkan kinerja bagi petugas SKDR khususnya mengenai pelaporan, pencatatan, analisis, validasi, diseminasi, kelengkapan, dan ketetapan dalam pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon agar berjalan dengan baik.¹⁹

2. Skripsi Karya Afira Amalia yang berjudul “Hubungan peran keluarga dalam Kewaspadaan dini Demam Berdarah dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue di Desa Gerbang Wilayah kerja Puskesmas Patrang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan peran keluarga dalam kewaspadaan dini demam berdarah dengan kejadian Demam Berdarah Dengue di Desa Gebang wilayah kerja Puskesmas Patrang. Penelitian ini bertujuan untuk Hasil Pembahasan Penelitian ini adalah Kewaspadaan Dini Demam Berdarah Dengue sangatlah penting bagi keluarga. Kewaspadaan adalah sebuah aksi dimana kita membentengi diri dengan sesuatu yang membuat kita aman, menghindari diri dari hal-hal tidak diharapkan dengan meningkatkan perhatian dan semua kemungkinan. Kewaspadaan Dini demam berdarah bisa dilakukan dengan menjaga lingkungan sekitar, contoh dari kewaspadaan itu sendiri bisa dilakukan dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dilakukan dengan kegiatan 3M+ di rumah keluarga masing-masing.²⁰

¹⁹ Syahrini Sarmin, *Pengaruh Pelaksanaan Program Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) pengendalian Kasus Diare Akut di Puskesmas Kabupaten Takalar Tahun 2015*, Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2015, 83.

²⁰ Afira Amalia, *Hubungan Peran Keluarga Dalam Kewaspadaan Dini Demam Berdarah dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue di Desa Gerbang Wilayah Kerja Puskesmas Patrang*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember, 2017, 17

3. Jurnal Ilmiah Penelitian karya Eliterius Sennen yang berjudul “Kewaspadaan Dini sebagai upaya Menjaga Keamanan Masyarakat”. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tangangan, hambatan, dan gangguan. Deteksi dini adanya indikasi dan potensi gangguan keamanan harus selalu dilakukan di lingkungan masing-masing. Partisipasi warga masyarakat untuk mewujudkan kewaspadaan dini sangat penting, bahkan sebagai kunci untuk menyukkseskan deteksi deteksi dini terhadap ancaman, tangangan, hambatan, dan gangguan untuk menjaga keamanan dari lingkungan masing-masing. Partisipasi warga masyarakat untuk mewujudkan kewaspadaan dini.²¹
4. Jurnal Penelitian karya Julia Pertiwi yang berjudul “Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Sragen” penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan SKD KLB DBD yang dilakukan oleh Posko DBD DKK Sragen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses sistem informasi surveilans DBD sebagai pendukung Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa di DKK Semarang yang sekarang ini berjalan dilakukan dengan merekap laporan W2 Rumah sakit dan Puskesmas secara rutin satu minggu sekali kemudian dilakukan pengolahan data dengan semi manual, yaitu menggunakan excel melalui format DBD Elektronik.²²

Berdasarkan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan apa yang di teliti oleh penulis mengenai kewaspadaan dini. Adapun perbedaan

²¹ Eliterius Sennen, *Kewaspadaan Dini Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Masyarakat*, Jurnal Inovasi, Vol. 3, No. 2 Juli, 2019, 87

²² Julia Pertiwi, *Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Sragen*, Jurnal Manajemen Informasi dan Administrasi Kesehatan, Vol. 2, No. 2 November, 2019, 49

antara penelitian yang dilakukan peneliti dan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian ini berfokus Kewaspadaan Dini Mengenai Penyakit COVID-19. Penelitian ini mengenai Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai COVID-19 Perspektif Fiqh Siyasah di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Terhadap perbedaan tersebut maka penelitian ini layak dilanjutkan.

H. Metode Penelitian

Adapun yang penulis gunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*field research*).²³ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁴ Penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah “suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur

²³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996) Cetakan 7, 81.

²⁴ Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 5.

yang ada dalam fenomena tertentu”.²⁵ Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini mengenai COVID-19 di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.²⁶ Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari wawancara kepada responden yang merupakan Kepala Camat, Sekretaris Camat, Para Kasi Kecamatan Natar dan tokoh Masyarakat di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal buku-buku, dokumen majalah, jurnal ataupun media internet.²⁷

²⁵ Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III, Cet. Ket-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 114.

²⁷ Galang Taufani, Suketi, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 215.

1. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dan seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²⁸ Populasi yang digunakan berjumlah 43 orang pemerintah daerah dan 188.901 orang masyarakat. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perangkat pemerintah daerah dan masyarakat di kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan.

b. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya”.²⁹ Yakni untuk memilih responden dengan masalah yang tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. yang menjadi sampel adalah 16 orang dari perangkat Pemerintah Daerah Kecamatan dan Masyarakat yaitu: 1 Kepala Camat, 1 Sekretaris Camat, 5 orang Perangkat Camat, 4 orang tokoh masyarakat, 2 orang tokoh agama, 2 orang tokoh Pemuda.

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

²⁸ Juliansyah, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), 157.

²⁹ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 89.

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.³⁰ dalam penelitian ini, yang dimaksudkan untuk mengamati secara langsung objek-objek yang diteliti yang berada di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.³¹ Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan, atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa dokumen, transkrip, surat kabar, majalah, jurnal, catatan serta buku-buku yang ada yang ada hubungannya dengan tema penelitian.”³²

Adapun dalam penelitian ini metode dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh data tentang: Bagaimana peran Pemerintah Daerah dan

³⁰ Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

³¹ Ibid, 107.

³² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 57.

Masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini mengenai COVID-19 di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

3. Metode Pengelolaan Data

Pengelolaan Data meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data sudah benar atau relevan dengan data penelitian dilapangan ataupun dari literatur.³³
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis. Sehingga mudah dipahami dan di interprestasikan.
- c. *Sistematizing* atau sistematisasi, yaitu “menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah”, yang dimaksud dalam hal ini yaitu : mengelompokkan data secara sitematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.³⁴

4. Metode Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode yang data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.³⁵

³³ Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Bandung: PT Grafindo Persada, 2010), 56.

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 9.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 8.

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisis data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan dipergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Memuat uraian tentang landasan dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III Memuat secara rinci mengenai deskripsi objek tempat penelitian yang berisi data tempat, visi misi dan tugas dan wewenang objek penelitian tersebut.

BAB IV Berisi Hasil Penelitian, Lalu di analisis dengan kajian yang ada dengan apa yang telah peneliti lakukan mengenai objek penelitian dan juga di analisis berdasarkan Fiqh Siyasah.

BAB V Bab terakhir ini berisikan kesimpulan, dan saran-saran atau rekomendasi kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih-yafqahufiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).¹ Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang-bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.²

Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.³ As *siyasah* berasal dari kata-kata, *saasa-yasuusu-siyaasah* yang artinya "Mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan".

Apabila kedua lafadz *fiqh* dan *al-siyasi* digabungkan maka akan menjadi *fiqh siyasah* atau dikenal juga dengan istilah *fiqh siyasah syar'iyah*. Fiqh Siyasah sendiri menurut terminologi memiliki beberapa makna, antara lain:

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: konstektualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta:Pranamedia Group 2014), 2.

² Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, (Bandar Lampung:Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 38.

³ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al islami*, (Damaskus:Daral-Fikr, 2001), 18.

- a. Menurut Imam al- Bujairimi, yang dimaksud dengan *fiqh Siyasah* adalah “memperbagus permasalahan rakyat dengan cara mengatur dan memerintah mereka dengan tujuan membuat masalah untuk mereka sendiri. Kemaslahatan ini terwujud dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan”.⁴
- b. Menurut Imam Ibn ‘Abidin, yang dimaksud dengan *fiqh siyasah* adalah “mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara menunjukannya kepada jalan yang bisa menyelamatkan, baik di dunia maupun diakhirat”.⁵
- c. Menurut Ibn Qayyim dalam Ibn ‘Aqil menyatakan “Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan bahkan Allah tidak menentukannya”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang membahas mengenai kepentingan demi umat manusia berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna membawa umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menghindari dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara dan bermasyarakat yang dijalaninya.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang

⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta:Prenanda media, 2003), 2.

⁵ Ali Syariati, *Imamah dan Umamah*, Terj. Afif Muhammad(Mizan,1989),

lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi tiga bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.

Menurut al Mawardi dan Ibn Taimiyyah dalam buku karangan *fiqh siyasah* karangan Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

Menurut Imam al-Mawardi ruang lingkup *fiqh siyasah* yaitu,

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Tentang Peraturan Perundang-undangan).
- b. *Siyasah Maliyyah* (Tentang Kebijakan Ekonomi dan Moneter).
- c. *Siyasah Qadla'iyyah* (Tentang Kebijakan Peradilan).
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Tentang Politik Peperangan).
- e. *Siyasah Idariyyah* (Tentang Kebijakan Administrasi Negara).⁶

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah yaitu,

- a. *Siyasah Qadla'iyyah* (Peradilan).
- b. *Siyasah 'Idariyyah* (Administrasi Negara).
- c. *Siyasah Maliyyah* (Keuangan atau Ekonomi).
- d. *Siyasah Dauliyah* / *Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Luar Negeri).

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Pramedia Grup, 2014), 14.

kebutuhan mereka. Dan Abdul Wahhab Khali'af mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyasah Qadla'iyyah* (Kebijaksanaan Peradilan).
- b. *Siyasah Dauliyyah* (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri).
- c. *Siyasah Maliyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi atau Keuangan Negara).⁷

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, menyatakan bahwa objek kajian *Fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa syari'ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah aman yang tetap.

Hasby membagi ruang lingkup *Fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundangan-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
- c. *Siyasah Qadla'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan peradilan).
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara)

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasat al-Syar'iyyat*, Dar al-Anshor, (Qahirat, 1977), 5.

- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang).⁸

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konsitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

B. Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Fiqh Siyasah

1. Konsep Pemerintahan

Bersamaan dengan munculnya negara sebagai organisasi terbesar yang relatif awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintahan mutlak harus ada untuk membarenginya. Yaitu munculnya keberadaan dua kelompok orang yang memerintah di satu pihak yang memerintah di lain pihak.

"*Perintah*" atau "*pemerintahan*" dalam bahasa inggris dipergunakan kata "*government*" atau bersal dari suku kata "*to govern*". Tetapi "*Perintah*" disalin dengan "*to order*" atau "*to command*" dengan kata lain kat "*to command*" tidak diturunkan dari "*to govern*". Secara etimologi, pemerintahan dan pemerintah dapat diartikan sebagai berikut :

⁸ Hasby Ash Shaddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah), 28.

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.⁹

Pada umumnya yang disebut “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.¹⁰ Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.¹¹

Pada hakekatnya pemerintahan ada dan diadakan untuk melayani kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan dasar manusia yakni rasa aman dan tertib dan tentram, sehingga fungsi dasar pemerintah adalah pelayanan, baik menyelenggarakan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan

⁹ Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*, Edisi Revisi Kedua, (Bandung: Mandar Maju, 2013), 4.

¹⁰ Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 11.

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat 2.

pelayanan kemasyarakatan.¹² Hakekat pemerintahan adalah pelayanan kepada rakyat, dengan kata lain pemerintah adalah “pelayan rakyat”. Pelayanan public oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat.

Definisi pemerintah, W.S. Sayre mengatakan pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan yang menjalankan kekuasaannya.¹³ Selanjutnya menurut Samuel Edward Finer, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (*process*), negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*) dan cara, metode serta sistem (*manner, method and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat.¹⁴

2. Pengertian Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”.¹⁵

“Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”¹⁶

¹² Rahyunir Rauf, *Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan*, Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Vol. 3, No. 1, April 2017, 223.

¹³ Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). 10.

¹⁴ Ibid h. 11.

¹⁵ UUD 1945 pasal 18 ayat 1.

¹⁶ UUD 1945 pasal 18 ayat 5.

Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”¹⁷

Pemerintah merupakan pemangku jabatan (pejabat = *ambtsdrager*) pemerintahan (untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan-jabatan).¹⁸ Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingannya.

Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁹

¹⁷ UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2.

¹⁸ Dudung Abdullah, *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*, Jurnal Hukum Positivum, Vol.1, No.1, Desember 2016, 85.

¹⁹ M. Rendi Aridhayandi, *Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (good governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Gografis*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.48, No.4, 2018.

Pemerintah Daerah (*imamah*) sebagai pemimpin merupakan tanggung jawab besar karena itu merupakan amanah dari Allah, baik atau tidaknya sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri. Dengan kata lain bahwa tujuan suatu kepemimpinan adalah menciptakan rasa aman, keadilan, kemaslahatan, menegakan amar ma'ruf nahi munkar, mengayomi rakyat, mengatur dan menyelesaikan problem-problem yang dihadapi masyarakat.

Kepemimpinan (*imamah*) merupakan sesuatu yang harus ada dan jelas dalam rangka membina dan mengarahkan masyarakat kepada sesuatu yang menjadi tuntutan dalam kehidupan. Keberadannya merupakan sebuah keharusan yang mengakibatkan ketiadaan dalam kepedulian. Hal tersebut menyebabkan arah manusia jauh dari bimbingan. Jika dalam semua hal dalam kehidupan manusia ini selalu diatur dan dituntun oleh syariat maka tentu saja masalah kepemimpinan umat ini menjadi satu hal yang harus ada dan jelas.²⁰

Kata pemimpin dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu *Imam*, *Khalifah*, *Amir*, *Malik*, dan *Sulthan*. *Imamah* menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imama* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya, *Imamah* sering juga disebut *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata *imam* juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.²¹ Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata *imamah*, yang ada hanya kata *imam* (pemimpin) dan *'aimmah* (pemimpin-pemimpin), Firman Allah SWT dalam QS.Al-Anbiya: 73

²⁰ Ahmad Anas, *Konsep Imamah dalam Perspektif Syi'ah* Imayah, Jurnal Pemikiran dan kebudayaan Islam, Vol.27, No 1, Januari, 2018, 1.

²¹ Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 15.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ



“Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah”. (QS Surat An-Anbiya’[21]: 73)²²

Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsinya. Adapun secara istilah Imam adalah seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus. Dalam hal ini pengertian pemerintah daerah menurut Fiqh Siyasah termasuk dalam “wullat”. Wullat (pemimpin daerah tingkat I dan II) atau bisa disebut dengan sebutan wali adalah orang yang di angkat oleh imam untuk menjadi pejabat pemerintahan di suatu daerah tertentu serta mejadi pimpinan di daerah tersebut. Adapun negeri yang dipimpin oleh imam Islamiyah bisa diklasifikasi menjadi beberapa bagian. Masing-masing bagian itu disebut wilayah (setingkat provinsi). Setiap wilayah dibagi lagi menjadi beberapa bagian, dimana masing-masing bagian itu disebut „imalah (setingkat kabupaten). Orang yang memimpin wilayah disebut wali, sedangkan orang yang memimpin „imalah disebut amil atau hakim.

²² Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemahan Hadis*, (Bandung : Cordoba Internasional, 2004), 328.

Tidak ada suatu negara dapat tegak dan kuat tanpa hukum demikian. Apabila peraturan itu dibuat oleh suatu cendekiawan dan para elite bangsa, maka pemerintahan itu disebut sebagai Negara berdasarkan atas rasio (aql).²³ Imamah di suatu daerah adalah wajib hukumnya, tujuannya adalah menegakan hukum Allah dan mengatur sistem kemasyarakatan yang berlandasan syariat untuk mencapai kemaslahatan. Imamah harus menjaga dan melestarikan hukum-hukum, lebih-lebih menyangkut akidah, memerangi musuh yang mengancam keamanan maupun kesehatan Negara dan bangsa dan menjaga keamanan dan keadilan rakyatnya.²⁴

Al-Mawardi dalam Al-Sulthaniyah menyinggung keberadaan pemimpin (imamah) sangat penting artinya antara lain karena imamah mempunyai 2 tujuan: pertama : *Likhilafati an-Nubuah fi-Harosati ad-Din*, yakni sebagai pengganti misi kenabian untuk menjaga agama. Dan kedua: *Wa sissati ad-Dunnya*, untuk memimpin atau mengatur urusan dunia. Dengan kata lain bahwa tujuan suatu kepemimpinan adalah menciptakan rasa aman, keadilan, kemaslahatan, menegakan amar ma'ruf nahi munkar, mengayomi rakyat, mengatur dan menyelesaikan problem-problem yang dihadapi masyarakat.²⁵

Ibn Taymiyah memaparkan, Kepemimpinan memiliki dua tujuan: *pertama*, mewujudkan kemaslahatan dalam bidang spiritual (keagamaan) maupun dalam bidang sosial-ekonomi. Kemaslahatan di bidang spiritual-keagamaan dilakukan dengan memperbaiki cara hidup beragama umat manusia (*ishlah al-ddin al-nass*). Pengabdian pada tujuan ini dapat menimbulkan kerugian dan kesia-siaan didunia dan akhirat. Sedangkan

²³ Muh Amin Husein Nasution, Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 218.

²⁴ Wahyu Abdul Jafar, *Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No 1, 2017.

²⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al Sulthaniyah*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1980), 6.

kemaslahatan sosial-ekonomi dicapat dengan cara: 1) mengelola keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat; 2) menjamin ketentraman melalui upaya penegakan syariat islam sehingga hukuman hanya diberikan kepada orang-orang yang melampaui batas.²⁶

Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Kehidupan masyarakat yang selalu berubah (dinamis) merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, sebuah keniscayaan manusia bisa hidup secara individual dalam lingkungannya.²⁷

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Harus diingat, kehidupan kolektif tidak serta merta bermakna sekelompok orang harus hidup berdampingan di satu daerah tertentu, memanfaatkan iklim yang sama, dan mengkonsumsi makanan yang sama..²⁸

Pandangan Murtadha Murthahhari tentang hakikat masyarakat sesuai dengan skenario penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi, yaitu tegaknya keadilan ilahi yang berlaku untuk alam dan manusia. Murtadha Murthahhari menilai manusia diciptakan cenderung mengikuti keseluruhannya. Bahwa pada dasarnya, penciptaan manusia bersifat sosial agar misi ilahi terjawantahkan di muka bumi. Tujuan diturunkannya

²⁶ Ibnu Taymiyah, *al-Siyasah al-Syari'yyah fi Ishlah Ra'i wa Ra'iyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, (1988), 143..

²⁷ Bambang Tejokusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jurnal Geoedukasi Vol. 3, No 1, 2014.

²⁸ Murtadha Murthahhari, *Masyarakat dan Sejarah*, (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012), 5.

agama untuk mendidik akhlak manusia agar mencapai kesempurnaannya sebagai hamba.²⁹

Murthahhari menganalisa dengan cermat dan menilai konsep masyarakat yang dipahami oleh pemikir barat begitu rapuh dan tidak memiliki dasar yang kokoh. Murthahhari menawarkan alternatif baru dalam mendefinisikan hakikat masyarakat dalam kaitannya dengan pandangan islam. Bahwa islam juga memberikan keterangan tentang masyarakat dan individu, masyarakat dan individu masing-masing memiliki kriterianya. Sebagaimana ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki konotasi sosial dan individu.

Masyarakat dalam pandangan islam merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran islam yang menyangkut kehidupan bersama. Karena itulah masyarakat harus menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerja sama umat menuju adanya suatu pertumbuhan manusia yang mewujudkan persamaan dan keadilan. Pembinaan masyarakat haruslah dimulai dari pribadi-pribadi masing-masing wajib memelihara diri, meningkatkan kualitas hidup, agar dalam hidup ditengah masyarakat itu dirinya berguna bagi masyarakat. Aturan moral lengkap ini didasarkan pada waktu suatu system nilai yang berisi norma-norma yang sama dengan sinar tuntutan religious seperti:ketaqwaan, penyerahan diri, kebenaran, keadilan, kasih sayang, hikmah, keindahan dan sebagainya.³⁰

3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Dalam pemerintahan modern dewasa ini, Rasyid dalam bukunya *Makna Pemerintahan dari Segi etika dan*

²⁹ Sulfan, Akilah Mahmud, *Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari*, Jurnal Aqidah-Ta Vol. 4, No 2, 2018.

³⁰ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 125.

Kepemimpinan membagi fungsi menjadi tiga bagian, yaitu fungsi pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowering*), dan fungsi pembangunan (*development*).

Ryaas Rasyid mengatakan fungsi pelayanan adalah “bahwa pemerintah akan menghasilkan keadilan dalam masyarakat”. Hal ini disebabkan karena pelayanan pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat.

Menurut Rasyid, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat di tingkatkan.

Kemudian Ryaas Rasyid menjelaskan tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Menurut Ndaraha fungsi pemerintahan terbagi menjadi dua fungsi yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Lebih lanjut dikatakan bahwa “Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, dan layanan *civil* termasuk layanan birokrasi. Kedua jenis fungsi ini disingkat sebagai fungsi pelayanan. Pemerintah berfungsi sekunder sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu untuk penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya, termasuk penyediaan dan pembangunan saran dan prasarana fungsi ini disingkat sebagai fungsi pemberdayaan”.

Ryaas Rasyid menjelaskan penjelasan mengenai tugas-tugas pokok pemerintah sebagai berikut :

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi

pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.³¹

Jika dilihat dalam kajian Fiqh Siyasah, maka persoalan tentang pemerintahan daerah ini akan masuk dalam pembahasan *siyasah dusturiyah*, karena *siyasah*

³¹ Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*, (Jakarta. PT Mutiara Sumber Widya. 2000). 3.

dusturiyah membahas tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakan.
- c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Al-mawardi menyebut dua hak imam yaitu, hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita mempelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.³²

Adapun tugas-tugas dari seorang imamah, yaitu:

- a. Melindungi/menjaga keutuhan agama.
- b. Menerapkan hukum pada para pihak yang berperkara (masalah perdata).
- c. Melindungi wilayah Negara dan tempat suci.
- d. Menegakan supremasi hukum pidana (*hudud*).
- e. Melindungi daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh.

³² Ahmad Djazuli, *Fiqh SIyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 93.

- f. Memerangi para penentang islam, setelah mereka didakwahi dan masuk islam atau dalam perlindungan kaum muslimin (*ahlu zimmah*).
- g. Mengambil *fa'i* (harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peperangan) dan sedekah sesuai dengan kewajiban syariat.
- h. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam kas Negara tanpa berlebihan.
- i. Mengangkat orang-orang terlatih dalam tugas-tugas kenegaraan (misalnya: orang jujur yang mengurus keuangan, dsb).
- j. Terjun langsung untuk menangani berbagai persoalan, menginspeksi keadaan.
- k. Imam harus mundur dari imamah, karena dua hal, yaitu: cacat dalam keadilan atau fisik, akibatnya adanya syahwat atau syubhat; cacat tubuh, terbagi tiga: cacat pancaindra; cacat organ tubuh; cacat tindakan.³³

Pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah bentuk dakwah dengan sasaran semakin terberdayakan potensi-potensi yang ada dimasyarakat. Dakwah merupakan perwujudan tugas dan fungsi manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* yang melekat sejak awal penciptaan manusia, yaitu dalam rangka menumbuhkan dan mewujudkan keshalehan individual dan keshalehan sosial, yaitu pribadi yang memiliki kasih sayang terhadap sesama dan mewujudkan tatanan masyarakat *marhamah* yang dilandasi oleh kebenaran tauhid, persamaan derajat, semangat persaudaraan, kesadaran akan arti penting

³³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 139.

kesejahteraan bersama, dan penegakan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.³⁴

Tugas dan fungsi manusia sebagaimana disebutkan diatas merupakan implikasi dari kedudukan dan posisi manusia sebagai hamba Allah yang angkat menjadi petugas-Nya dengan jabatan sebagai khalifah (wakil Allah) di bumi, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, yaitu:

- a. Tugas beribadah, yakni menegakan ke-Esaan Allah, memberantas segala macam kemusyrikan dan melaksanakan pengabdian kepada-Nya.
- b. Tugas khalifah, yakni bahwa manusia adalah khalifah (wakil) Allah di bumi.³⁵

Sebagai khalifah, manusia mengembang tugas untuk membangun dan memakmurkan bumi ini dengan pembangunan yang berparadigma surgawi, yakni masyarakat mengakui bahwa Allah adalah Tuhan mereka dan mereka tidak dihantui rasa takut juga tidak dibebani keprihatian.

4. Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor No 46 Tahun 2019 yang dimaksud dengan kewaspadaan dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.³⁶

Tujuan Kewaspadaan Dini di daerah meliputi Pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan informasi dalam rangka

³⁴ Mukhlis Aliyudin, *Pengembangan Masyarakat Islam Dalam Sistem Dakwah Islamiyah*, Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 4, No. 14, 2009.

³⁵ Ibid

³⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 3.

memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai bentuk ATHG (Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan) di daerah. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.³⁷

Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.³⁸

Kewaspadaan Dini di Daerah dilakukan oleh (1) Pemerintah Daerah dan (2) Masyarakat.³⁹ Fungsi kewaspadaan dini di daerah yaitu:

- a. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah; dan
- b. Meningkatkan Koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah.⁴⁰

Dalam Penelitian ini yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Camat di tingkat Kecamatan dan Masyarakat di kecamatan yang dimana dalam pasal 7 Pemedagri tentang kewaspadaan Dini.

- 1) Kewaspadaan dini di kecamatan menjadi tugas dan tanggung jawab camat.

³⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2019, Pasal 2.

³⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 5.

³⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2019, Pasal 4.

⁴⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2019, Pasal 3.

- 2) Tugas dan tanggung jawab camat sebagaimana dimaksud pada ayat(1)yaitu membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di kecamatan.⁴¹

Kecamatan yang merupakan bentuk organisasi perangkat daerah Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Guna efektivitas pelaksanaan otonomi daerah maka ada beberapa klasifikasi perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintah Daerah diantaranya ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menggariskan bahwa titik berat otonomi diletakkan pada daerah kabupaten dan kota. Dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 telah menerangkan tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Artinya, apabila dulu kecamatan merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintah, selain sebagai nasional, bentuk propinsi, kabupaten/kotamadya, dan kota administratif.

Dengan memandang kecamatan sebagai bentuk organisasi, maka kerja sama yang solid untuk mencapai tujuan adalah upaya rasional yang harus dilakukan untuk keberhasilannya. Kantor Kecamatan Natar merupakan Kecamatan yang memiliki letak strategis yang berada di tengah-tengah kota dimana masyarakatnya cenderung modern dan mempunyai tingkat kesibukan yang tinggi

⁴¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2019, Pasal 7.

sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁴²

Kewaspadaan dini masyarakat ialah sebuah bentuk dari kepekaan (kesadaran), antisipasi dan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi indikasi-indikasi permasalahan baik itu berupa permasalahan sosial, bencana alam, masalah kesehatan maupun masalah-masalah lain yang terjadi pada masyarakat. Kewaspadaan Dini Masyarakat yang terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.

Kewaspadaan dini masyarakat sendiri merupakan sebuah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi serta indikasi kekacauan yang timbul dari bencana alam maupun kekacauan yang timbul karena ulah manusia, dimana kekacauan yang timbul dari bencana ini dapat menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan serta aktivitas sehari-hari yang ada di masyarakat.

C. Coronavirus (COVID-19)

1. Pengertian Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus adalah virus RNA untai positif tidak tersegmentasi tunggal. Mereka termasuk ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae, dan Orthocoronavirinae subfamily sesuai dengan karakteristik serotipik dan genomic mereka. Coronavirus memiliki genus coronavirus dari keluarga Coronaviridae. Ini dinamai tonjolan berbentuk karangan bunga di amplop virus.

⁴² Reni Puji Lestari, Imam Hardjanto, Abdullah Said, *Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 3, No.1, 157-164.

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019 kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).⁴³

Virus Corona termasuk superdomain *biota*, kingdom *virus*. Virus corona adalah kelompok virus terbesar dalam *Nidovirales*. Semua virus dalam ordo *Nidovirales* adalah non-segmented positive-sense RNA viruses.⁴⁴ Virus Corona termasuk dalam genus dengan flor elliptic dan sering berbentuk pleomorfik, dan berdiameter 60- 140 nm. Virus ini secara genetic sangat berbeda dari virus SARS-CoV dan MERS-CoV. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa homologi antara COVID-19 dan memiliki karakteristik DNA coronavirus pada kelelawar-SARS yaitu dengan kemiripan lebih dari 85%. Ketika dikultur pada vitro, COVID-19 dapat ditemukan dalam sel epitel pernapasan manusia setelah 96 jam. Sementara itu untuk mengisolasi dan mengkultur vero E6 dan Huh-7 garis sel dibutuhkan waktu sekitar 6 hari.

2. Gejala-Gejala COVID-19

COVID-19 bisa sulit didiagnosis berdasarkan gejala-gejala karena kemunculannya sangat mirip dengan pilek biasa atau flu. Penyakit-penyakit yang dilaporkan

⁴³Anwar Daud,dkk, *Penanganan Coronavirus(Covid-19) Ditinjau Dari Perspektif Kesehatan Masyarakat*, (Yogyakarta: Gosyen Publisng, 2020), 6.

⁴⁴MLE Parwanto, *Virus Corona (2019-nCoV) penyebab COVID-19*, Jurnal Biomedika dan Kesehatan, Vol 3,No 1, Maret 2020 , 1.

memiliki gejala ringan sampai penyakit berat dan kematian untuk kasus-kasus COVID-19 yang terkonfirmasi.

Gejala-gejalanya bisa muncul dalam 2-14 hari setelah terpapar:

- a. Demam.
- b. Batuk.
- c. Sesak napas.
- d. Pneumonia (di beberapa kasus).
- e. Tubuh terasa pegal.
- f. Mual dan atau muntah.
- g. Diare.⁴⁵

Virus ini menginfeksi sistem pernapasan bagian bawah dan berlipat ganda. Virus ini menyerang dua sel paru-paru tertentu: sel yang memproduksi *mucus* (membersihkan kotoran, termasuk virus, dari paru-paru). Sel-sel ciliated dianggap menjadi sel-sel yang lebih disukai untuk diserang virus corona. Ketika sel-sel ini diserang dan mati, mereka membasahi paru-paru, yang penuh dengan kotoran dan cairan. Akibatnya, banyak pasien yang terinfeksi virus ini akhirnya mengalami pneumonia.

Sistem Kekebalan tubuh bereaksi terhadap paru-paru dan, akibatnya, paru-paru meradang. Meskipun peradangan ini adalah hal biasa dalam melawan infeksi, di dalam paru-paru peradangan ini bisa terasa tidak nyaman. Di beberapa kasus di mana sistem kekebalan tubuhnya sedang melawan virus corona, terjadi reaktivitas yang hiper dari sistem kekebalan tubuh sehingga

⁴⁵ Tess Pennington, *Panduan Kesiapsiagaan Hadapi Virus Corona*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2020), 14.

mengakibatkan jaringan yang lebih sehat mati di dalam paru-paru dan memperburuk kondisi pneumonia-nya.

Seperti diketahui bahwa transmisi utama dari SARS-CoV-2 adalah melalui droplet. Akan tetapi, ada kemungkinan terjadinya transmisi melalui fekal-oral.⁴⁶ Peradangan juga menghasilkan *alveoli* yang lebih bisa ditembus air. *Alveoli* adalah kantong-kantong udara kecil di dalam paru-paru. *Alveoli* ini dipenuhi cairan dan cairan ini membanjiri paru-paru sehingga seseorang tidak lagi bisa bernapas. Ketika kerusakan pada paru-paru bertambah, kehancuran paru-paru meningkat dengan cepat pasien-pasien yang mencapai tahap ini dalam serangan virus corona bisa mengalami kerusakan paru-paru yang permanent berupa goresan-goresan yang mengeraskan paru-paru, atau mereka bisa meninggal.⁴⁷

3. Penyebaran dan Penularan COVID-19

Cara penyebaran virus corona ada dua: dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia. Perubahan pola penyebaran ini membuat infeksi virus corona semakin sulit dikendalikan.

a. Penyebaran dari Hewan ke Manusia

Berdasarkan penelitian oleh El-Kafrawy dan koleganya ditemukan fakta bahwa virus corona awalnya berasal dari hewan. Setelah itu berkembang dan menginfeksi manusia.

b. Penyebaran dari Manusia ke Manusia

Penyebaran dari manusia ke manusia (person-to-person) terutama terjadi melalui saluran napas. Organisasi kesehatan dunia, WHO menduga pola penyebaran ini mirip dengan SARS dan MERS, yaitu

⁴⁶ Nur Indah Fitriani, *Tinjauan Pustaka COVID-19: Virologi, Patogenesis dan Manifestasi Klinis*, Jurnal Medika Malahayati, Vol 4, No 3, Juli 2020, 197.

⁴⁷ Ibid, 14-15.

melalui droplet. Oleh karena itu, penting untuk menjaga jarak terhadap orang yang telah terindikasi dan tertular dengan virus corona. Partisipasi aktif kita dalam mencegah terinfeksi akan sangat menekan penyebaran virus ini.

Infeksi terjadi melalui saluran napas merupakan bentuk penyebaran yang sangat berbahaya. Hal ini terlihat dari angka kenaikan orang yang terinfeksi. Perlu diketahui pula virulensi suatu virus sangat ditentukan konsentrasi virus yang masuk dan imunitas seseorang. Semakin banyak virus yang masuk dalam tubuh kita efek rusaknya sangat tinggi. Pada kondisi klinis dapat menghancurkan jaringan karena sel kehilangan keutuhannya ini disebut sebagai CPE (*cytopathic effects*).⁴⁸

Secara umum penularan paling efektif virus corona antarmanusia adalah droplet atau cairan yang dikeluarkan saat batuk atau bersin serta menempel di benda sekitar. Penularan antar manusia yang terjadi dengan massif membuat pembatasan jarak dan social harus dilakukan dengan ketat. Oleh karena itu, upaya preventif perlu dilakukan dengan menjaga jarak berkisar 1-2 meter. Cairan yang mengandung virus Corona keluar melalui batuk atau bersin dapat menempel dibagian mulut atau hidung seseorang, kemudian terhirup saat mengambil napas dan masuk ke paru-paru.

Potensi penyebaran makin membesar saat pola infeksi sudah mencapai tingkat komunitas. Proses penyebaran komunitas (*community spread*) menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan sebab seseorang bisa terinfeksi dengan tanpa sadar kapan dan dimana hal tersebut terjadi. Segala upaya

⁴⁸ Baharudin, Fathimah Andi Rumpa, 2019-*nCOV Jangan Takut Virus Corona*, (Yogyakarta:Rapha Publishing, 2020), 35-36.

dilakukan untuk mencegah agar tingkat reproduksi virus dan penularan virus menurun, seperti kebijakan lockdown, karantina, hingga kebijakan khas Indonesia yang disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keberhasilan menghentikan penyebaran virus membutuhkan upaya keras semua pihak.⁴⁹

4. Pencegahan Virus Corona

Virus Corona yang menyerang seluruh lapisan masyarakat sangat memprihatinkan. Pencegahan penyebaran virus corona ini masih bisa dicegah dengan cara yang sederhana dengan Social Distancing/ Physical Distancing sebagai berikut:

a. Cuci Tangan

Saat cuci tangan dengan sabun dan air minimal dilakukan selama 20 detik, Jika tak ada air dan sabun bisa dengan hand sanitizer dengan kandungan alcohol minimal 60 persen.

b. Jangan Menyentuh Tempat Umum

Ketika berada di fasilitas umum, sebaiknya jangan menyentuh tombol lift, pegangan pintu, pegangan tangga atau escalator, jika harus menyentuh sebaiknya gunakan tisu atau lengan baju dan segera cuci tangan setelahnya.

c. Hindari Keramaian

Kasus Infeksi virus corona atau covid-19 mudah menyerang saat di tempat ramai, karena itu diusahakan tidak berada dikeramaian apalagi dalam ruangan berventilasi buruk, bila terpaksa berada dikeramaian jangan sembarangan menyentuh wajah, hidung, dan mata apalagi bila belum cuci tangan.

d. Penyemprotan Cairan Disinfektan

⁴⁹ Etri Yanti, Nova Fridalni, Hermawati, *Mencegah Penularan Virus Corona*, Jurnal Abdimas Saintika Vol. 2, No. 1, Juni 2020.

Menyemprot rumah dan tempat hunian lainnya menggunakan cairan disinfektan menjadi upaya lain mencegah kasus infeksi virus corona atau covid-19.

e. Menggunakan Masker

Setelah cara-cara pencegahan ini dilakukan, jangan lupa gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah ataupun dalam aktivitas lainnya.⁵⁰

Salah satu cara untuk mencegah terinfeksi virus corona adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun tubuh. Pada dasarnya, tubuh manusia memiliki sistem imun untuk melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Namun, ada hal-hal yang dapat melemahkan sistem imun atau daya tahan tubuh seseorang seperti penuaan, kekurangan gizi, penyakit, bahkan obat-obatan tertentu. Oleh karena itu, fungsi sistem imun perlu senantiasa dijaga agar daya tahan tubuh kuat. Pada dasarnya, tubuh manusia memiliki sistem imun untuk melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imun tubuh adalah mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga dengan rutin, mengelola stress dengan baik, beristirahat yang cukup, mengonsumsi suplemen penunjang daya tahan tubuh.⁵¹

5. Istilah-Istilah Baru dalam Penanganan COVID-19

Kementerian Kesehatan mengumumkan istilah-istilah dalam penanganan COVID-19. Keputusan itu tertera dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor KH.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

⁵⁰ Karyono, Rohadin, Devia Indriyani, *Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol. 2, No. 2, 2020.

⁵¹ Walsyukurniat Zendrato, *Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Terhadap Pandemi Covid-19*, Jurnal Education and Development Vol.8, No.2, Mei 2020.

Istilah baru yang dimaksudkan adalah Kasus Probable, yaitu orang yang diyakini sebagai suspek dengan penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) berat atau gagal napas akibat aveoli paru-paru penuh cairan (ARDS). Probable bisa juga didefinisikan untuk pencerita IPSA berat yang meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan terkena COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium terkait *reverse transcriptase-polymerase chain reaction* (RT-PCR).

Dalam keputusan tersebut juga diberikan beberapa istilah lain yang selama ini sudah dikenal masyarakat dan kini mengalami perubahan. Di antaranya orang dalam pantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang tanpa gejala (OTG). Perubahan istilah tersebut menjadi Kasus Suspek, Kasus Konfirmasi (bergejala dan tidak bergejala), dan Kontak Erat.

Seseorang disebut mengalami Kasus Suspek apabila memiliki salah satu dari kriteria berikut :

- a. Orang dengan ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.
- b. Orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19.
- c. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

Sedangkan seseorang dengan Kasus yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

Kasus Konfirmasi dibagi menjadi dua, yakni Kasus Konfirmasi dengan gejala (simptomatik), dan Kasus Konfirmasi tanpa gejala (asimtomatik).

Kemudian seseorang disebut sebagai Kontak Erat ketika memiliki riwayat kontak dengan Kasus Probable atau Konfirmasi COVID-19 Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:

- a. Kontak tatap muka atau berdekatan dengan Kasus Probable atau Kasus Konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih.
- b. Sentuhan fisik langsung dengan Kasus Probable atau Konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain).
- c. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap Kasus Probable atau Kasus Konfirmasi tanpa menggunakan alat pengaman diri (APD) yang sesuai standar.
- d. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian resiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.

Pada Kasus Probable dan Konfirmasi yang bergejala (simptomatik), untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari dua hari sebelum timbul kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Pada Kasus Konfirmasi yang tidak bergejala (asimptomatik), untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari dua hari sebelum dan 14 hari sesudah tanggal pengambilan specimen kasus konfirmasi

Selain istilah-istilah tersebut tadi, dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan itu tercantum juga istilah baru seperti Pelaku Perjalanan, Discarded dan selesai Isolasi.

Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Kemudian, disebut Discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Seseorang dengan status Kasus Suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR dua kali negative selama dua hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam.
- b. Seseorang dengan status Kontak Erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.

Istilah Selesai Isolasi terjadi apabila pasien memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Kasus Konfirmasi tanpa gejala (asimtomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan specimen diagnosis konfirmasi.
- b. Kasus Probable atau Kasus Konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR dengan ditambah 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal tiga hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam gangguan pernapasan.
- c. Kasus Probable atau Kasus Konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang mendapatkan hasil pemeriksaan *follow up* RT-PCR 1 kali negative, dengan ditambah minimal tiga hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.⁵²

Epidemi COVID-19 adalah sebuah fakta yang sekarang sedang dihadapi di semua daerah-daerah di Indonesia termasuk kabupaten Lampung Selatan. Strategi

⁵² indonesia.go.id/layana/kesehatan/ekonomi/istilah-istilah-dalam-penanganan-covid-19, diakses pada tanggal 19 Desember 2020, Pukul 21.50.

dan Upaya dari berbagai pihak dalam hal ini pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sangatlah perlu untuk dilakukan mengingat dampak yang ditimbulkan dan tidak adanya obat untuk menyembuhkan COVID-19 tentunya upaya tersebut merupakan salah satu prioritas pemerintah yang harus dilakukan dalam menekan penyebaran epidemic COVID-19. Berikut data perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Lampung Selatan :

Tabel 2.1
Data COVID-19 Lampung Selatan (Periode 18 Maret-18 Desember 2020, Pukul 18.00 WIB)

N o	Kecamata n	Suspek Baru	Konfirmas i	Kasu s Baru	Kasu s Lama	Masih Isolas i
1.	Bakauheni	0	4	0	4	2
2.	Candipuro	0	4	0	4	4
3.	Jati Agung	0	44	0	44	0
4.	Kalianda	0	26	0	26	4
5.	Katibung	0	11	1	10	3
6.	Ketapang	0	2	0	2	0
7.	Merbau Mataram	0	11	0	11	10
8.	Natar	0	111	0	111	23
9.	Palas	0	2	0	2	0
10 .	Penengaha n	0	11	1	10	3
11	Raja Basa	0	2	0	2	0

.						
12	Sidomulyo	0	22	2	20	6
.						
13	Sragi	0	2	0	2	0
.						
14	Tajung Bintang	0	35	0	35	7
.						
15	Tajung Sari	0	9	0	9	2
.						
16	Wai Panji	0	2	0	3	2
.						
17	Way Sulan	0	5	2	3	4
.						

Sumber : Instagram Dinas Kesehatan Lampung Selatan

Dari data COVID-19 tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan paling banyak terkonfirmasi adalah Kecamatan Natar dengan total Konfirmasi 111 orang dan masih Isolasi 23 orang.⁵³ dikarenakan Kecamatan Natar adalah tepat yang strategis bagi masyarakat keluar masuk kota Bandar Lampung maupun dari Kota Palembang. hal ini perlu adanya upaya Pemerintah Daerah Kecamatan dan juga Masyarakat setempat untuk bekerja sama dalam mewaspadai dan melakukan pencegahan penyebaran COVID-19.

⁵³ covid-19.lampungselatankab.go.id, diakses pada tanggal 19 Desember 2020, Pukul 22.50.

DAFTAR RUJUKAN

Buku :

- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006: Darul Falah, 2006.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al islami*. Damaskus: Daral-Fikr, 2001.
- Anwar Daud,dkk. *Penanganan Coronavirus(Covid-19) Ditinjau Dari Perspektif Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: Gosyen Publising, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi III, Cet.Ket-4*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Lp2m IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- As-Salus, Ali Ahmad. *Aqidah al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah*. Jakarta: Gema Insani Prees, 1997.
- Baharudin, Fathimah Andi Rumpa. *2019-nCoV Jangan Takut Virus Corona*. Yogyakarta: Rapha Publishing, 2020.
- Bukhar, Imam. *Sahih Buhkari*. Bairut: Dar Al-Fikr, 2007.
- Djazul, Ahmad. *Fiqh Siyasa-Implemetasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Djazuli. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Prenanda media, 2003.
- Emzir. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Bandung: PT Grafindo Persada, 2010.
- Galang Taufani, Suketi. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, , 2018.
- Hasan, Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- HD, Kaelany. *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Pramedia Grup, 2014.
- Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan 7. Bandung: CV Bandar Maju, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *al-Siyasat al-Syar'iyat*. Qahirat: Dar al-Anshor, 1977.
- Khamami Zada, Mujar Ibnu Syarif. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- M.S, Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Martono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raya Grafindo Persada, 2010.
- Mawardi. *Al-Ahkam Al Sulthaniyah*. Bairut: Dar Al-Fik, 1980.
- Muh Amin Husein Nasution, Iqbal. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranamedia Group, 2014.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Babkti, 2004.
- Mujahir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993.
- Murthahhar, Murtadha. *Masyarakat dan Sejarah*. Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012.
- Nurhayati, Agustina. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2013.
- Pennington, Tess. *Panduan Kesiapsiagaan Hadapi Virus Corona*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Purnomo Setiadi Akbar, Husan Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Putri, Raihan. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islami*, cet 1. Yogyakarta: AK Grup, 2006.
- Rasyid, Ryaas. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2000.
- RI, Kementrian Agama. *Mushaf Al-Quran dan Terjemahan Hadis*. Bandung: Cordoba Internasional, 2004.
- Rohman, Saiful, *Teori Komunikasi, Ragam dan Aplikasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

- Shaddieqy, Hasby Ash. *Pengantar Siyasaah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, 2009.
- Soelaeman, Manadar. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Surianingrat, Bayu. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan, Edisi Revisi Kedua*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Tanzeh, Ahamd. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Taymiyah, Ibnu. *al-Siyasaah al-Syari'yyah fi Ishlah Ra'I wa Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988.
- Tika, Mohammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Skripsi :

- Afira Amalia, *Hubungan Peran Keluarga Dalam Kewaspadaan Dini Demam Berdarah dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue di Desa Gerbang Wilayah Kerja Puskesmas Patrang*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember, 2017.
- Syahrini Sarmin, *Pengaruh Pelaksanaan Program Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) pengendalian Kasus Diare Akut di Puskesmas Kabupaten Takalar Tahun 2015*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2015.

Jurnal :

- Abdullah, Dudung. *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*, *Jurnal Hukum Positum*, Vol.1, No.1, Desember 2016.
- Adityo Susilo, dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No 1, Maret 2020.
- Akmal Khairi, *Analisis Pemberdayaan Peran dan Fungsi Camat*, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol 17, No. 2, Mei-Agustus 2010.

- Aliyudin, Mukhlis. "Pengembangan Masyarakat Islam Dalam Sistem Dakwah Islamiyah." *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 4, No. 14, 2009
- Amri, Miftaakhul. Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Et- Tijarie*, Vol.5, No.2, 2018.
- Anas, Ahmad. *Konsep Imamah dalam Perspektif Syi'ah Imayah*, *Jurnal Pemikiran dan kebudayaan Islam*, Vol.27, No 1, Januari, 2018.
- Aridhayandi, M. Rendi. Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (good governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Gografis, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.48, No.4, 2018
- Bay, Kaizal. Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim, *Jurnal Ushuludin*, Vol. 17, No. 1, Januari, 2011.
- Etri Yanti, Nova Fridalni, Hermawati,. " Mencegah Penularan Virus Corona." *Jurnal Abdimas Saintika* Vol. 2, No. 1, 2020
- Jafar, Wahyu Abdul. "Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat." *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No 1, 2017
- Jafar, Wahyu Abdul. "Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat." *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, 2017
- Halim, Fatimah. Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Tentang Jiwa (Al-Nafs) dalam Filsafat Islam, *Jurnal al-daulah*, Vol.1, No.2, Juni 2013.
- Hadi, M. Fahli Zatra. Tasawuf Untuk Kesehatan Mental, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.40, No.1, Januari-Juni, 2015.
- Henny Syaputri, Laura Mariati Siregar, Frida Liharis Saragih, Pencegahan Penularan Covid-19 Melalui Sosialisasi dan Pembagian Masker di Pasar Pringgane Medan, *Jurnal Kreativitas Pengabdian kepada Masyarakat(PKM)*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2020.
- Karyono, Rohadin, Devia Indriyani. "Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu." *urnal Kolaborasi Resolusi Konflik* Vol. 2, No. 2, 2020

- Kingking Muttaqien, Sugianto, Sarif Sarifudi, Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesehatan Lingkungan Melalui Program Bank Sampah, *Jurnal Indonesian Of Adult and Community Education*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2019.
- Kurniawan, Muchamad Mirsa. "Peran Pemerintah Dalam Perpektif Fiqh Siyasah ." *Jurnal Al Daulah Vol. VI No. 2*, 2016
- Merry Onibala, Marlien Lopian, Ventje Kasenda, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Talikuran Barat Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Moch Halim Sukur, dkk, Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan, *Jurnal Inicio Legis*, Vol 1, No. 1, Oktober 2020.
- Nur Indah Fitriani, Tinjauan Pustaka COVID-19: Virologi, Patogenesis dan Manifestasi Klinis, *Jurnal Medika Malahayati*, Vol 4, No 3, Juli 2020, 197
- Parwanto, MLE. "Virus Corona (2019-nCoV) Penyebab COVID-19, *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, Vol 3, No 1, Maret 2020 .
- Rahyunir Rauf, Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan, *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, Vol. 3, No. 1, April 2017.
- Reni Puji Lestari, Imam Hardjanto, Abdullah Said,. "Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 3, No.1, 2016.
- Sennen, literius. " Kewaspadaan Dini Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Masyarakat." *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, Vol. 3, No 2, 2019
- Sulfan, Akilah Mahmud,. "Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari." *Jurnal Aqidah-Ta Vol. 4*, No 2, 2018
- Tejokusumo, Bambang. "Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial." *Jurnal Geoedukasi*, Vol. 3, No 1, 2014
- Suharti, Al-Siyasah Al-Syariah 'inda Ibn Taimiya, Al-Ittihad, *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol 2, No.2, 2015

Wiratmo, Liliek Budiastuti. Sosialisasi Pemutusan Rantai Penyebaran Covid-19 di Kelurahan Tlogosari kulon Kota Semarang, *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol.8, No.1, mei 2020.

Zendrato, Walsyukurniat. "Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Terhadap Pandemi Covid-19, ." *Jurnal Education and Devolopment*, 2020

Undang-Undang:

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2019 Tentang Kewaspadaan Dini.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Internet:

covid-19.lampungselatankab.go.id,

[indonesia.go.id/layana/kesehatan/ekonomi/istilah-istilah-dalam-penanganan covid-19](https://indonesia.go.id/layana/kesehatan/ekonomi/istilah-istilah-dalam-penanganan-covid-19).

